

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLORA**

**2.1 Profil Instansi**

Alamat : Jl. Gunandar No. 2 Blora, Kabupaten Blora , Jawa Tengah

Telepon : (0296) 531148

Fax : (0296) 5298567

Jam Kerja : Senin-Jum'at 08.00 s.d. 16.00 WIB

**2.2 Visi dan Misi Instansi**

- **Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora**

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Yang Bersih, Mandiri dan Berwibawa

- **Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora**

Menghimpun Penerimaan Pajak dengan melakukan Edukasi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Secara Sistematis, Kontinyu dan Berkelanjutan demi Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan yang Sadar dan Tertib Pajak.

## **2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan keputusan presiden RI Nomor 84 tahun 2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang kedudukan, Tugas,, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan 67/PMK.01/2008 dinyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Instansi Vertika Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya KPP Pratama bertanggung jawab melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak untuk semua jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan fungsi keberatan ( Ps. 25 UU KUP dan Ps. 16 UU PBB ), pengurangan / penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan pajak (Ps. 36 UU KUP) dan pengurangan PBB ( ps. 19 UU KUP ) dan fungsi pemeriksaan oleh pejabat Fungsional.

### **2.3.1 STRUKTUR KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai berikut :

1. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadmuinistrasian dokumen dan berkas perkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, dan pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, dan administrasi pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor.
6. Seksi Eksternifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam

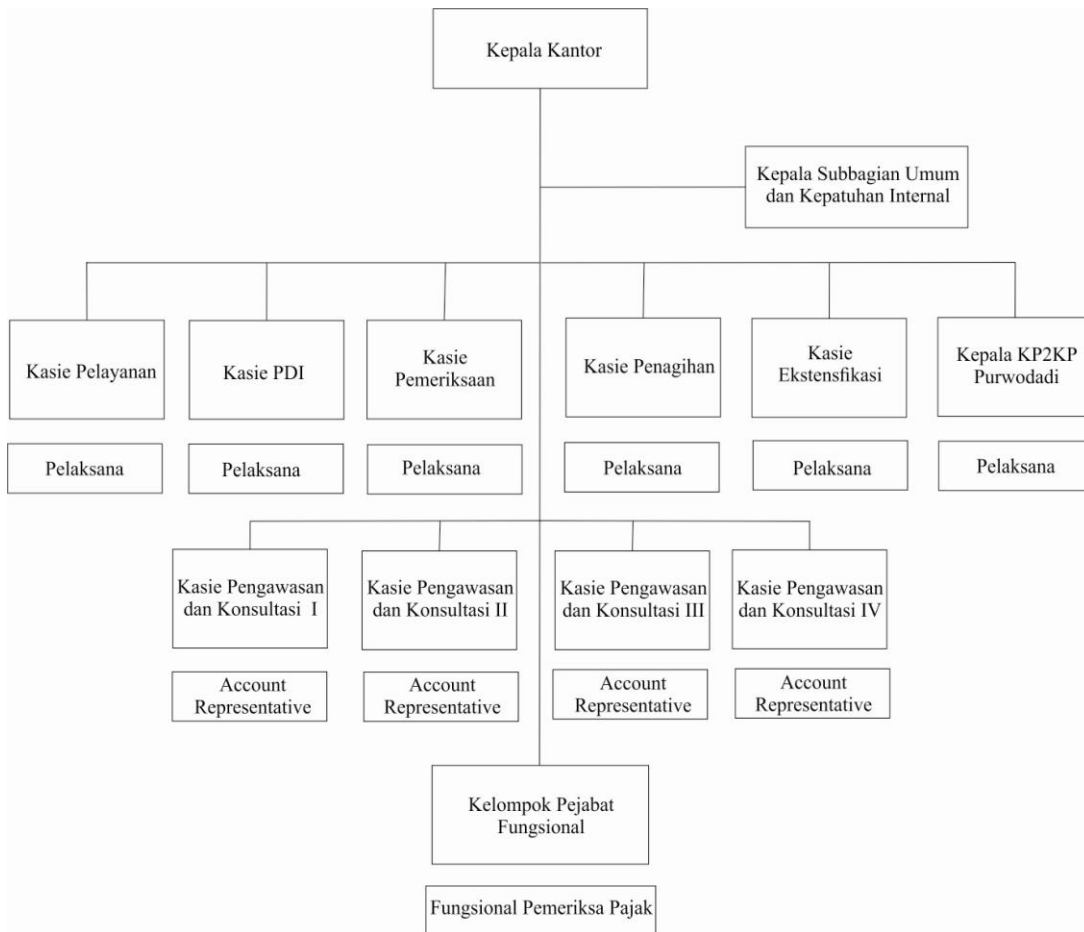
menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, dan penyuluhan perpajakan.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib Pajak.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi VI memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.

### 2.3.2 STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA BLORA

**Gambar 2.1**

**Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora**



*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora, 2017*

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penagamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
2. Penetapan dan Penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan Perpajakan.
5. Pelayanan Perpajakan.
6. Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak.
7. Pelaksanaan ekstensifikasi dan Pengurangan sanksi Pajak.
8. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
10. Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan.
11. Pembetulan ketetapan pajak.
12. Pelaksanaan administrasi kantor.

#### **2.4 Mandat yang Diberikan Kepada Instansi**

Sebagai lembaga pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora merupakan amanah dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak dan berusaha menjadi instansi yang accountable atau mampu menjalankan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora secara transparan.

## 2.5 Peran Strategis Instansi

Secara administratif Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora mempunyai Wilayah kerja KPP Pratama Blora meliputi 2 wilayah Kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Terletak pada titik koordinat rupa bumi  $11.00 15^{\circ}$  BT –  $11.10 34^{\circ}$  BT dan  $60.53^{\circ}$  LS –  $70.30^{\circ}$  LS. Secara administrasi terbagi menjadi 35 Kecamatan dan 575 desa/kelurahan, dengan total luas wilayah sebesar 379.645,3 hektar. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro
- b. Sebelah Selatan : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi
- c. Sebelah Barat : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak
- d. Sebelah Utara : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

## 2.6 Kekuatan Sumber Daya yang Ada

Jumlah pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora tahun 2016 adalah sebanyak 87 orang yang berdasarkan golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Golongan II	= 32 orang
Golongan III	= 49 orang
Golongan IV	= 6 orang

Dari jumlah tersebut diatas dapat ditunjukkan kualitas sumber daya manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :

Pasca Sarjana	= 12 orang
Sarjana	= 34 orang
Sarjana Muda	= 1 orang
Diploma III	= 20 orang
Diploma I	= 9 orang
SMA	= 7 orang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora terletak di Jalan Gunandar No. 2 Blora terdiri dari 3 ( tiga ) lantai. Lantai Pertama sebagai Tempat pelayanan Wajib Pajak dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sedangkan Lantai kedua sebagai ruang kepala kantor, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV dan ruang pelayanan bagi Wajib Pajak yang ingin mengikuti Tax Amnesty. Lantai ketiga sebagai Aula pertemuan, Seksi Ekstensifikasi dan Seksi Pemeriksaan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora juga mempunyai tempat parkir yang memadai bagi karyawan dan Wajib Pajak. Sedangkan kekuatan sumber daya eksternal yang berpengaruh adalah :

1. Hubungan dengan pihak ketiga / Pemerintah Daerah / Instansi terkait.
2. Perkembangan dan Perubahan tingkat sosial dan ekonomi yang sangat cepat dengan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi.
3. Wilayah Kerja yang sangat luas mencakup 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan dengan total 35 Kecamatan serta 575 Desa / Kelurahan.
4. Karakteristik potensi daerah yang sangat beragam.

Dari berbagai macam kekuatan sumber daya diatas diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Blora dapat melaksanakan amanah yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan baik sesuai dengan Visi dan Misinya.